

# **RANCANGAN AKHIR**

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021**



**DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	5
1.4 Maksud dan Tujuan .....	7
1.5 Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021**

---

**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

**1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa jenis perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka 1 (satu) tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, dan merupakan tahun ketiga dari periodisasi RPJMD yang disusun dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja Disnaker, serta

penjaringan aspirasi masyarakat, dengan pendekatan dalam perencanaan yaitu Partisipatif, teknokratis, *Top-Down Planning* dan *Bottom-up Planning* serta politik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat diubah berdasar hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembang daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah.
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Disnaker Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 berjalan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penambahan/ penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, serta proyeksi prioritas belanja, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka perlu dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021 untuk menampung seluruh perubahan yang terjadi karena

perubahan asumsi makro ekonomi daerah yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD induk Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan kondisi tersebut, Disnaker Kabupaten Magetan dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan Renja tahun 2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  - 14.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

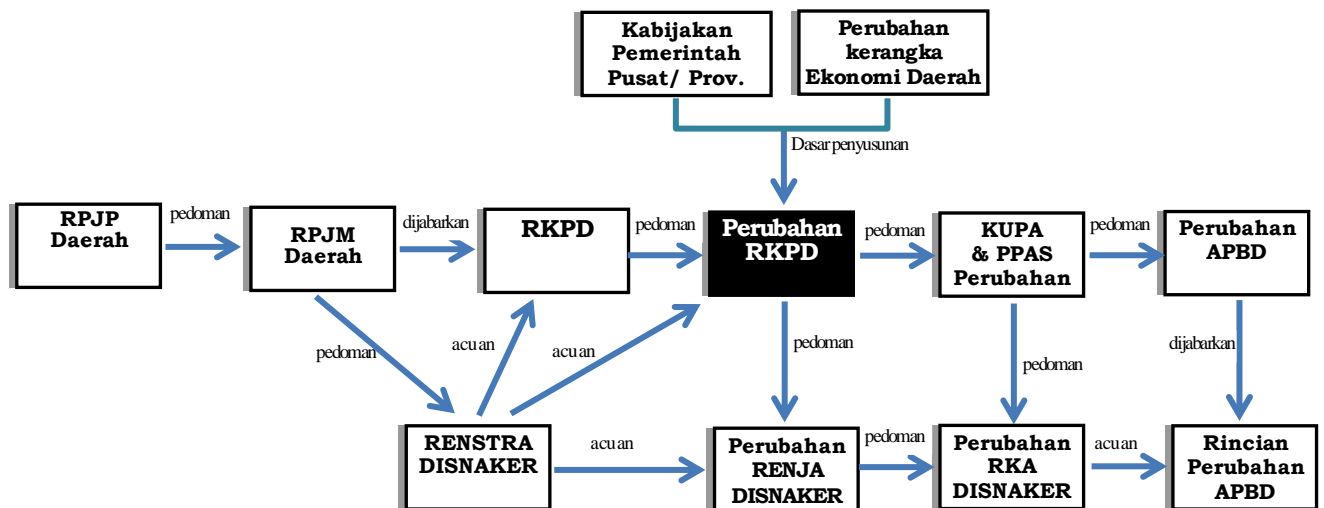
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
- 18.. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 39);

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja disebabkan karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja

Disnaker dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

**GAMBAR 1.1**  
**KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RENJA DISNAKER**  
**DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA**



Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan Renja Disnaker dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja;
- Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja;
- Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Disnaker yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran;
- Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.



#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Disnaker Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Disnaker Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Disnaker Tahun 2021 adalah untuk :

1. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah serta indikator atau ukuran keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021;
2. Memberikan arah atau acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis (Renstra) dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program /kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;

#### **1.5 Sistematika Penyajian**

Sebagaimana ketentuan pada pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyajian Perubahan Renja Kab. Magetan tahun 2021 disusun sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**TABEL SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA**  
**KAB. MAGETAN TAHUN 2021**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1.	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan Renja PD yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka pendanaan Daerah

1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan Renja PD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3.	Hubungan antar Dokumen	Hubungan Perubahan Renja PD dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan RKPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya.
1.4	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja.
1.5	Sistematika Dokumen Renja	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Perubahan Renja PD
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b>		
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan sampai dengan triwulan II. (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan target Renstra).		
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>		
Memuat pergeseran/ perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan		
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.		

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja Disnaker Tahun 2021. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Disnaker Tahun 2021, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker Tahun 2021 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2021 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Evaluasi Renja Disnaker tahun 2021 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan I program dan kegiatan tahun 2021 pada Dinas Tenaga Kerja dengan capaian yang harus dicapai pada Renja tahun 2021 dalam satuan persentase, dikompilasi dengan target akhir capaian Renstra Disnaker. Selanjutnya secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan tersaji dalam tabel II.1.









Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SRPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SRPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SRPD sampai dengan Renja SRPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SRPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang diwawahi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SRPD yang diwawahi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang diwawahi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SRPD s/d Tahun 2021 (Abstr Tahun Pelaksanaan Renja SRPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SRPD s/d Tahun 2021 (%)			
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/78100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100			
					Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penyertaan tenaga kerja	2.07.04	PROGAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Persentase peserta kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja   %	100	%	3.810.000.000			101.424.275			2.300.000			33.606.200			35.906.200			35.906.200	0	0,94				
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkeja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja   Ibulan	36	Bulan	725.000.000			67.796.025	3	Bulan	2.300.000	3	Bulan	28.606.200			30.906.200	50,00	45,59	30.906.200	17	4,26				
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar kerja	Jumlah peserta kerja yang mendapat fasilitas penempatan antar kerja   orang	7100	Orang	443.000.000		1200	Orang	34.879.425	415	Orang	2.300.000	545	Orang	14.272.900		960	Orang	16.572.900	80,00	47,51	960	14	3,74		
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja   orang	700	Orang	282.000.000		100	Orang	32.917.100	-	Orang	-	50	Orang	14.333.300		60	Orang	14.333.300	50,00	43,34	60	7	5,08		
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja   Ibulan	36	Bulan	1.470.000.000		12	Bulan	9.719.650	3	Bulan	-	3	Bulan	-		6	Bulan	-	50,00	-	6	17	0,90		
		2.07.04.2.03.01	Penelitian dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penyediaan jasa internet   Ibulan	12	Bulan	10.000.000		0	Bulan	-	-	Bulan	-	-	Bulan	-		-	Bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0,00		
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah dokumen penempatan tenaga kerja   Idukumen	36	Dokumen	200.000.000		12	Dokumen	9.719.650	3	Dokumen	-	3	Dokumen	-		6	Dokumen	-	50,00	-	6	17	0,90		
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitas penempatan Job Fair   orang	3700	Orang	1.260.000.000		0	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-		-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0,00		
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pa dan Pema Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang mendapat pelatihan, uji kompetensi dan penugasan kasus PMI   Iorang	190	Orang	1.615.000.000		10	Orang	23.908.100	1	Orang	-	Orang	5.000.000		1	Orang	5.000.000	10,00	30,91	1	1	0,31			
		2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI yang mendapat pelatihan dan uji kompetensi   Iorang	160	Orang	1.615.000.000		0	Orang	23.908.100	-	Orang	-	-	Orang	5.000.000		-	Orang	5.000.000	#DIV/0!	20,91	-	1	0,31		
				Jumlah kasus ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terungkap   orang	30	Orang			10	Orang		1	Orang	2	Orang	-		3	Orang	-	30,00	#DIV/0!	3	10	#DIV/0!			
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penyertaan tenaga kerja	1.1.3	Program Perindungan dan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan   %	100	%	550.000.000	100	%	347.731.625												100	%	347.731.625	100	63,92		
		1.1.3.2	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi DME dan bentuk peraturan ketenagakerjaan   orang	240	Orang	165.000.000	180	Orang	148.537.675													180	Orang	148.537.675	75	90,02	
		1.1.3.3	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah pelaksanaan pertemuan atau forum tripartit   Ikali	2	Kali	275.000.000	1	Kali	96.021.250													1	Kali	96.021.250	50	94,92	
		1.1.3.4	Penanganan kasus lembaga penyalar tenaga kerja	Jumlah perusahaan pengenal tenaga kerja yang dibantu   Perusahaan	6	Perusahaan	55.000.000	7	Perusahaan	49.634.000														7	Perusahaan	49.634.000	116,67	90,23
		1.1.3.5	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang terungkap   %	100	%	55.000.000	100	%	53.548.700														100	%	53.548.700	100	97,36
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penyertaan tenaga kerja	2.07.05	PROGAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan   %	100	%	1.080.000.000	100	%	150.007.050							46.631.250									46.631.250	0	4,32
		2.07.05.2.01	Pengawasan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi DME dan bentuk peraturan ketenagakerjaan   orang	450	Orang	290.000.000		60	Orang	52.077.400	-	Orang	-	-	Orang	5.755.100		-	Orang	5.755.100	-	11,06	-	1	1,98		
		2.07.05.2.01.03	Penyuluhan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi DME dan bentuk peraturan ketenagakerjaan   orang	450	Orang	290.000.000		60	Orang	52.077.400	-	Orang	-	-	Orang	5.755.100		-	Orang	5.755.100	-	11,06	-	1	1,98		
		2.07.05.2.02	Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mngok Kerja dan Pendaftaran Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama   Ikasus	18	Kasus	790.000.000		5	Kasus	97.929.650		Kasus	-	Kasus	40.876.150				Kasus	40.876.150	-	41,74	-	1	5,17		





## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan prioritas program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten Magetan, regional, provinsi maupun nasional yang dihadapi, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial. Penyusunan perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2021 disusun berdasarkan acuan yang ada dalam RPJMD dengan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan melibatkan berbagai pihak, kemudian diselaraskan dengan program/kegiatan dari Disnaker untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Renja Disnaker) tahun 2021 tetap mengacu pada Renstra tahun 2019-2023, yang merupakan tahun keempat dari periodisasi RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab. Magetan tahun 2018-2023.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Renja Disnaker) Tahun 2021 memerlukan fokus dan arah kebijakan pembangunan yang jelas, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah, tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah usulan program dan kegiatan harus bersifat mendesak dan prioritas serta menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Dinas Tenaga Kerja kabupaten Magetan, memacu pencapaian target capaian kinerja dan pencapaian target RPJMD, mencukupi belanja wajib/ prioritas yang belum teranggarkan dalam APBD induk 2021, penyesuaian terhadap program/kegiatan Kabupaten yang merupakan kebijakan dari pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mempertimbangkan kecukupan sisa waktu dari pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2021. Juga yang paling penting adalah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam struktur Perubahan APBD tahun 2021.

Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan Renja Disnaker tahun 2021 tetap mengacu pada Program prioritas RPJMD 2018-2023 dan Renstra tahun 2019-2023 dengan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selanjutnya, program dan kegiatan pada Perubahan Renja Disnaker Kab. Magetan Tahun 2021 secara rinci dan lebih lengkap dapat kita lihat dari tabel III.1 dibawah ini :



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
207164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	12 bulan	12 bulan	85,5 angka	12 Bulan	14,736,370	9,310,670	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	14,736,370	
207165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	12 bulan	12 bulan	85,5 angka	12 Bulan	14,995,410	14,984,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	14,995,410	
207166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	12 bulan	12 bulan	85,5 angka	12 Bulan	3,540,000	3,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	3,540,000	
207169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	12 bulan	12 bulan	85,5 angka	12 Bulan	68,800,000	117,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	68,800,000	
20718	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>322,879,650</b>	<b>286,900,650</b>				<b>322,879,650</b>	
207182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	12 bulan	12 bulan	85,5 angka	12 Bulan	41,930,650	33,112,650	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	41,930,650	
207183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	2 paket	12 Bulan	85,5 angka	12 Bulan	14,449,000	15,648,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	14,449,000	
207184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	13 bulan	12 bulan	85,5 angka	12 Bulan	266,500,000	238,140,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	266,500,000	
20719	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>89,799,500</b>	<b>251,596,220</b>				<b>99,799,500</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
207191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 Bulan	23,989,500	49,786,220	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	23,989,500		
207192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,8 Skor	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 Bulan	7,410,000	7,410,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	7,410,000		
207199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,8 Skor	2 paket	2 paket	100 persen	12 Bulan	48,800,000	184,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	58,800,000		
207191	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,8 Skor	12 bulan	1 Paket	100 persen	12 Bulan	9,600,000	9,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Skor IKM Dinas Tenaga Kerja	80,8 Skor	9,600,000		
2072	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>											<b>80,490,950</b>	<b>0</b>			<b>132,719,970</b>				
20721	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>											<b>80,490,950</b>	<b>0</b>			<b>132,719,970</b>				
207211	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 %	1 dokumen	0 dokumen	100 persen	0 Dokumen	80,490,950	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu	0 %	82,719,970		

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
20702020	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 %	1 dokumen	0 dokumen	100 persen	0 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu	0 %	50,000,000
20703	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>												<b>1,006,560,615</b>	<b>1,112,541,270</b>		<b>406,875,070</b>		
207031	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>												<b>824,685,545</b>	<b>945,760,360</b>		<b>255,000,000</b>		
2070311	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah peserta pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	80 orang	130 orang	25 persen	130 Orang	750,252,235	852,327,050	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DBH CHT		Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	230,000,000
2070312	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta	Jumlah peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	8 orang	8 Kali	25 persen	130 Orang	35,000,000	14,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	25,000,000
2070313	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah penyediaan peralatan pelatihan kerja	Jumlah peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 orang	7 Unit	25 persen	130 Orang	39,433,310	79,433,310	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	0
207032	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>												<b>56,248,920</b>	<b>56,248,920</b>		<b>26,248,920</b>		
2070321	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan	Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	20 lembaga	20 lembaga	25 persen	20 Lembaga	56,248,920	56,248,920	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	26,248,920
207035	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>125,626,150</b>	<b>110,531,990</b>		<b>125,626,150</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2070301	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	Jumlah kelompok usaha bersama yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas peningkatan produktivitas	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	5 k	50 Or	25 pers	50 Or	125,626,150	110,531,990	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/kompetensi serta produktivitas kerja	100 %	125,626,150	
20704	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>												<b>361,257,225</b>	<b>143,424,275</b>		<b>571,045,970</b>		
207041	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>												<b>72,752,675</b>	<b>109,796,525</b>		<b>72,752,675</b>		
2070412	Pelayanan antar Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja	Jumlah pelayanan antar kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 orang	1200 orang	22 pers	12 Bulan	34,879,425	74,879,425	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	34,879,425	
2070413	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja	Jumlah pelayanan antar kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	200 orang	100 orang	22 pers	12 Bulan	37,873,250	34,917,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	37,873,250	
207043	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>												<b>264,596,450</b>	<b>9,719,650</b>		<b>354,385,195</b>		
2070431	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah penyediaan jasa internet	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 dokumen	0 bulan	22 pers	12 Bulan	4,980,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	0	
2070432	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah dokumen penempatan tenaga kerja	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 dokumen	12 dokumen	22 pers	12 Bulan	9,719,650	9,719,650	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	9,719,650	
2070433	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penyelenggaraan Job Fair	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1000 orang	0 orang	22 pers	12 Bulan	249,896,800	0	DBH CHT	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	344,665,545	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
20744	2.0	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>											23,908,100	23,908,100			143,908,100	
207441	2.0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan dan uji kompetensi Jumlah kasus ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertangani	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan, uji kompetensi dan penanganan kasus PMI	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	100 %	0 Orang 10 Orang	22 persen	10 Orang	23,908,100	23,908,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja	100 %	143,908,100
2075	2.0	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>											150,007,050	150,007,050			150,007,050	
20751	2.0	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											52,077,400	61,648,750			52,077,400	
207513	2.0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 orang	90 Orang	100 persen	90 Orang	52,077,400	61,648,750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100 %	52,077,400
20752	2.0	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>											97,929,650	88,358,300			97,929,650	
207521	2.0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang terdata dan mendapatkan sosialisasi sarana hubungan industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 perusahaan	40 Perusahaan	100 persen	5 Kasus	19,684,350	19,684,350	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100 %	19,684,350





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 3 0 2.0 1 5	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 orang	25 orang	100 persen	7 KK	37,489,500	35,489,500	Pendapatan Bagi Hasil **)	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100 %	37,489,500	
3 2 3 0 2.0 1 6	Pelatihan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, dan mendapat pelatihan	Jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 KK	5 KK	100 persen	7 KK	37,496,100	31,250,700	Pendapatan Bagi Hasil **)	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100 %	37,496,100	
<b>TOTAL</b>												<b>5,024,667,780</b>	<b>4,915,093,541</b>				<b>7,502,600,000</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Perubahan Renja Disnaker Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Perubahan Renja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Disnaker Tahun 2021 sebagai acuan penyusunan anggaran program kegiatan Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2021;
2. Perubahan Renja disnaker Tahun 2021 menjadi landasan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kegiatan Disnaker Kabupaten Magetan.

Magetan, 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN

**GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19630510 199011 1 001